

Perencanaan Prioritas Lokasi TPA Khusus Kawasan Perkotaan (Studi Kasus : Kabupaten Bandung Barat)

Rita Sri Rejeki Panjaitan¹, Zefri², Irwan Prasetyo³

^{1,2,3} Prodi Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
uzai2206@gmail.com, zefri@unkris.ac.id, prasmoedomo@unkris.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Menentukan wilayah prioritas pelayanan persampahan Kabupaten Bandung Barat Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam pelaksanaannya metode penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan angka- angka serta menggunakan beberapa metode pendukung yakni metode kualitatif, dan deskriptif. Dalam proses penentuan rencana prioritas pelayanan persampahan ini ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu Analisis sebaran dan jumlah kebutuhan fasilitas persampahan serta Analisis skala kepentingan daerah pelayanan fasilitas persampahan. Berdasarkan hasil analisis Kecamatan Gununghalu dgn nilai akhir 27, sedangkan Kecamatan Cipeundeuy dan Cipongkor dengan nilai akhir 18. Semakin besar nilai yang di dapatkan menunjukkan bahwa Kecamatan Gununghalu layak menjadi kawasan TPA.

Kata Kunci : Fasilitas Persampahan, Frekuensi daerah pelayanan, Rencana Prioritas.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the priority areas for waste services in West Bandung Regency. This research uses quantitative research methods. In practice, this research method emphasizes the use of numbers and uses several supporting methods, namely qualitative and descriptive methods. In the process of determining the priority plan for solid waste services, there are two approaches taken, namely analysis of the distribution and number of waste facilities needs and analysis of the scale of interest of the waste facility service area. Based on the results of the analysis of Gununghalu District with a final score of 27, while Cipeundeuy and Cipongkor Districts with a final score of 18. The greater the value obtained indicates that Gununghalu District deserves to be a landfill area.

Keywords: Waste Facilities, Frequency of Service Areas, Priority Plans.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas perkotaan di dalam pembangunan untuk mencapai Kondisi masyarakat akan mempengaruhi perubahan di segala bidang kehidupan di dalam masyarakat yang akan datang yang tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi manusia sangat di perlukan adanya Lingkungan permukiman yang sehat, namun dapat juga menimbulkan akibat sampingan yang tidak dikehendaki dan mengandung resiko pencemaran serta pengrusakan lingkungan. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang

diakibatkan limbah hasil dari aktivitas industri maupun limbah domestik (sampah padat) yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari (Damanhuri, 2020:1-1). Produksi sampah padat kota yang tidak dikendalikan dengan baik akan menyebabkan daya dukung lingkungan kota semakin lama semakin menurun untuk menetralsisir zat-zat pencemar dari produksi sampah padat tersebut (Litbang PD Kebersihan Kota Bandung, 2009/208:1-1).

Pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang menjadi tugas besar pemerintah yang dapat dilakukan atas dasar kerja sama ataupun swadaya kepada masyarakat maupun swasta. Pengelolaan sampah yang dimaksud berupa penanganan dan pengurangan jumlah sampah yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, cakupan pelayanan dan penyediaan berbagai fasilitas pendukung pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah kota merupakan kebutuhan prasarana dasar yang harus dipenuhi dalam kerangka pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan. Permasalahan yang diakibatkan oleh peningkatan volume timbulan sampah kota semakin hari semakin kompleks, tidak hanya menyangkut permasalahan teknis operasional tetapi menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan dengan cara Kumpul - Angkut - Buang, kedepan tidak akan menyelesaikan masalah sampah bahkan dapat menimbulkan darurat sampah, hal ini disebabkan:

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat;
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan;
- c. Sulit mencari atau menentukan lokasi TPA;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, sehingga timbulan sampah yang tidak tertangani atau tidak terangkut semakin besar. Beban Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah tentunya akan sangat berat tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat, maka permasalahan sampah tidak akan berhasil dengan baik.

Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat yang dilayani saat ini adalah bersumber dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah hotel/pariwisata dan sampah industri dengan total kapasitas terangkut rata-rata 140 – 160 ton/hari. Ditinjau berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 sebanyak $\pm 1.710.088$ jiwa maka sesuai dengan karakteristik wilayah maka diperkirakan volume timbulan sampah seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.026 ton/hari, maka penanganan sampah tertangani hanya 13,6% setiap harinya. Pelayanan kebersihan bidang pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat, sampai saat ini masih belum optimal, dikarenakan belum seluruh wilayah terlayani oleh UPTD Kebersihan Kab. Bandung Barat, terutama untuk wilayah perdesaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat baru 10 (sepuluh) kecamatan yang dapat dilayani dengan jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) $\pm 140-160$ ton/hari. UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah baru mampumenangani 10 (Sepuluh) kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada, yaitu:

- a. Kecamatan Cililin
- b. Kecamatan Padalarang
- c. Kecamatan Ngamprah
- d. Kecamatan Lembang
- e. Kecamatan Parongpong
- f. Kecamatan Batujajar
- g. Kecamatan Cisarua
- h. Kecamatan Cihampelas

i. Kecamatan Cikalong wetan

j. Kecamatan Cipatat

Adapun 5 Kecamatan yang akan diteliti berdasarkan volume sampah dan belum terlayani yaitu :

1. Kecamatan Cipeundeuy
– 52,32 Ton/Hari
2. Kecamatan Cipongkor
– 52,73 Ton/Hari
3. Kecamatan Gununghalu
– 46,53 Ton/Hari
4. Kecamatan Rongga
– 36,04 Ton/Hari

5. Kecamatan Sindangkereta K

Luasnya wilayah pelayanan dan rendahnya tingkat pelayanan sampah menjadi beban berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam pelaksanaannya metode penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan angka- angka serta menggunakan beberapa metode pendukung yakni metode kualitatif, dan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari 2 (dua) sumber yang ada, yaitu data primer dan data sekunder (Marzuki, 2002 dalam Suranto, 2008) Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Masalah, tujuan, dan hipotesa penelitian, untuk sampai pada suatu kesimpulan harus didukung oleh data-data yang relevan. Relevansi data dengan variabel-variabel penelitian

didasari oleh metode pendekatan masalah yang relevan (Sumaatmaja, 1998:104). Pada suatu proses penelitian, tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang harus direncanakan untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian pada proses-proses selanjutnya. Sumber-sumber data yang dibutuhkan guna penyusunan studi ini adalah jumlah & sebaran tempat pembuangan sementara dan akhir, dominan fungsi utama kawasan, kepadatan penduduk, topografi dan jaringan jalan.

Dalam proses penentuan perencanaan prioritas lokasi TPA kawasan perkotaan ini ada dua pendekatan yang akan dilakukan yaitu :

- 1) Analisis sebaran dan jumlah kebutuhan fasilitas persampahan. Analisis sebaran dan jumlah kebutuhan fasilitas persampahan digunakan untuk perencanaan kebutuhan jumlah dan sebaran fasilitas persampahan berdasarkan jumlah penduduk.
- 2) Analisis skala kepentingan daerah pelayanan fasilitas persampahan Analisis skala kepentingan daerah pelayanan fasilitas persampahan digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi daerah pelayanan persampahan yang dibagi dalam beberapa kondisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hipotesis

Pengelolaan sampah kota

merupakan kebutuhan prasarana dasar yang harus dipenuhi dalam kerangka pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan. Pengelolaan sampah yang dimaksud berupa perencanaan, penanganan dan pengurangan jumlah sampah yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, cakupan pelayanan dan penyediaan berbagai fasilitas pendukung pengelolaan sampah. Apabila tidak dilakukan analisis maka akan menjadi hambatan untuk **kerangka pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan.**

2. Hasil Penelitian

1. Analisis Lokasi TPA

TPA sampah yang saat ini dimanfaatkan oleh Kabupaten Bandung Barat hanya TPA Regional Sarimukti. TPA ini mulai beroperasi sekitar tahun 2005 pasca longsornya Leuwigajah. TPA Regional Sarimukti melayani Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. diproses dan ditimbun di 1 (satu) TPSA, yaitu:

- TPSA Sarimukti terletak di desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat seluas 25,2 Ha yang dimiliki oleh Perhutani diperuntukan untuk Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dan TPSA tersebut dikelola oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Propinsi Jawa Barat.
- Umur TPA Regional Sarimukti diperkirakan akan berakhir pada tahun

2020. Sebagai alternatif pengganti TPA Regional Sarimukti ini, TPA akan pindah ke TPA Regional Legok Nangka. Lokasi TPA Regional Legok Nangka yang jauh serta kemacetannya akan menimbulkan permasalahan baru bagi Kabupaten Bandung Barat. Jauhnya wilayah pelayanan persampahan akan berdampak pada tingginya biaya operasional maupun tipping fee.

2. Analisis Sebaran dan Jumlah Kebutuhan fasilitas persampahan

Kecamatan Cipongkor dan Cipeundeuy termasuk dalam kategori intensitas kebutuhan fasilitas persampahan yang tinggi. Dengan jumlah total 20,042 kebutuhan fasilitas persampahan Kecamatan Cipongkor dan 17,640 kebutuhan fasilitas persampahan Kecamatan Cipeundeuy.

3. Analisis skala kepentingan daerah pelayanan fasilitas persampahan

Berdasarkan hasil analisis Kecamatan yang termasuk dalam kondisi 4 yaitu wilayah tanpa pelayanan, misalnya karena kondisi terlalu jauh, dan belum terjangkau oleh truk pengangkut sampah adalah kecamatan Cipeundeuy dan Sindangkerta. Kecamatan yang masuk dalam kondisi 3 yaitu wilayah dengan pelayanan rendah adalah daerah pinggiran kota adalah Kecamatan Gununghalu dan Rongga. Sedangkan, Kecamatan yang masuk dalam kondisi 2 yaitu wilayah dengan pelayanan menengah adalah kawasan

pemukiman teratur adalah Cipongkor.

4. Analisis Tipologi Rencana Prioritas Pelayanan Persampahan

Berdasarkan hasil analisis tipologi Kecamatan yang mendapatkan prioritas 1 yaitu Kecamatan Cipeundeuy dan Cipongkor. Prioritas 2 yaitu Kecamatan Gununghalu sedangkan Prioritas 3 yaitu Kecamatan Rongga dan Sindangkerta.

Kecamatan Cipeundeuy merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan.

5. Analisis Tipologi Kawasan TPA Baru/Alternatif

Berdasarkan hasil analisis Kecamatan Gununghalu dgn nilai akhir 27, sedangkan Kecamatan Cipeundeuy dan Cipongkor dengan nilai akhir 18. Semakin besar nilai yang di dapatkan menunjukkan bahwa kecamatan tersebut layak menjadi kawasan TPA.

Dalam menentukan TPA baru/alternatif, perlu untuk meninjau kebutuhan luas untuk TPA baru/alternatif yaitu seluas 42.56 Ha, adapun luas Kecamatan Gununghalu yang direncanakan menjadi kawasan TPA yaitu 514 Ha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tipologi kawasan TPA, Kecamatan Gununghalu layak menjadi kawasan TPA baru/alternatif untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan meminimalisir biaya operasional. Kebutuhan luas untuk TPA baru/alternatif yaitu seluas

42.56 Ha, adapun luas Kecamatan Gununghalu yang direncanakan menjadi kawasan TPA yaitu 514 Ha.

Berdasarkan Hipotesis dan Hasil Analisis bahwa jika tidak dilakukan analisis berupa perencanaan maka akan berdampak pada kurangnya cakupan pelayanan dalam rangka pengelolaan pembangunan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Nur Dyta, Erni Yuniarti, Yulita Fitrianiingsih. 2019. *Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Persampahan Kontainer TPS di Kecamatan Pontianak Selatan*. Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
- Damanhuri, Enri. Tri Padmi. 2006. *Diktat Kuliah TL-3150 Pengelolaan Sampah Edisi Semester I 2004/2005*. Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan, ITB. Bandung.
- J.B Israwati, Widiadi dan Susi Agustina Wilujeng. 2005. *Rencana Peningkatan Teknis Operasional Pengelolaan Persampahan di Kota Bau-Bau*. Program Studi
- Lesmana, Rudi Yoga. 2016. *Layanan Persampahan di Kota Surakarta dengan pemetaan berbasis sistem informasi geografis*. Program Studi Teknik
- Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Palangkaraya :Media Ilmiah Teknik Lingkungan Volume 1, Nomor 1.
- Paramita Diana, Kukuh Murtilaksono dan Manuwoto. 2018. *Kajian Pengelolaan Sampah berdasarkan Daya Dukung dan Kapasitas Tampung Prasarana Persampahan Kota Depok*. Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Juni 2018, 2 (2): 104-117
- Tasrin, Krismiyati dan Shafiera Amalia. 2014. *Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan di Wilayah Metropolitan Bandung Raya*. Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara. Sumedang : Jurnal Borneo Administrator. Vol. 10, No. 1 Barat.
- Sunarno. 2012. *Kajian Kinerja Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Karanganyar Ditinjau dari Aspek Operasional*. Tesis Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

- Suntari, Karlita Ayu. 2018. *Kajian Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat di Kawasan Perkotaan Ciwidey*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. Bandung.
- Sihombing, Chandra. 2007. *Analisis Faktor Determinan Kualitas Pelayanan Persampahan di Kota Pematangsiantar*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematangsiantar.